



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAMBANG IRAWAN LIMBONG**
2. Jabatan : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN**
3. NHK : **990534**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 522.600.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNGBALAI, HASIL SENDIRI Rp. 117.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA ASAHAN, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 204 m2/86 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNGBALAI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 279 m2/150 m2 di KAB / KOTA DAIRI, Rp. 300.000
5. Tanah Seluas 4.456 m2 di KAB / KOTA DAIRI, Rp. 300.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNGBALAI, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 110.000.000**

1. MOBIL, DAIHATSU XENIA 1.3 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA AFX12U21C07/SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ---**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 5.348.614**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----
Rp. 637.948.614

III. HUTANG

Rp. 435.120.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 202.828.614

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.